

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **Negara Versus Pasar : Studi Kasus Penyelewengan Pajak Keuntungan oleh Google.Inc Terhadap Britania Raya tahun 2014-2015**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2014 pemerintahan Britania Raya menghadapi sengketa yang serius melawan Google. Sengketa tersebut berakar pada praktik pengalihan pajak yang dilakukan oleh Google yang bertujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah Britania Raya. Praktek pengalihan pajak tersebut terbukti menciptakan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi Britania Raya. Pada tahun 2011 yang lalu Google mendapatkan omset keuntungan sebesar 46.5 triliun Dolar Amerika tetapi Google hanya membayar pajak kooperasi sebesar 87.28 Milliar Dolar Amerika, hal ini terjadi karena hasil keuntungan dari Google tersebut dialihkan untuk disimpan di cabang perusahaan Google yang berdiam di Negara dengan perumusan pajak yang lebih rendah dan melainkan menjaadi objek dari hukum Britania Raya<sup>1</sup>.

Empat tahun lalu, Eropa mulai memperhatikan bahwa beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia yang membayar pajak minimal pada miliaran dolar yang mereka dapatkan di seluruh benua. Di antara mereka yang U.K. dan pemerintah lainnya dikritik adalah Google.

---

<sup>1</sup> Bisnis, M. (2013, Mei Senin). *Inggris Tuduh Google Ngeplang Pajak, Orang Terkaya Ini Pasang Badan*. Retrieved from Medan Bisnis.

Meskipun tahun perdebatan sejak, analisis baru tersedia pengajuan surat raksasa pencari menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, tarif pajak efektif pada keuntungan non-AS. Nya tetap di satu digit-sekitar 7 persen.<sup>2</sup>

Pemerintahan Britania Raya secara resmi telah mengatakan bahwasanya perusahaan multinasional kooperations telah memanipulasi system pajak yang berlaku di Negara Britania Raya dengan cara mengalihkan uang hasil dari keuntungan dari penjualan Google ke Negara yang biaya pajaknya lebih kecil, hal ini dikenal sebagai "*Diverted Profit Tax*" atau yang lebih familiar dengan istilah "*Google Tax*".<sup>3</sup>

Pada 11 Februari dengar pendapat yang dilakukan Komite rekening publik Parlemen, kepala pajak Google Tom Hutchinson dan Matt Brittin, kepala operasi Eropa, berpendapat bahwa Google tidak harus membayar lebih dari \$ 185 juta dalam bentuk pajak jika mereka setuju untuk membayar setelah enam tahun audit yang dilakukan pemerintah. Hutchinson mengatakan perusahaannya membayar dekat dengan pajak penghasilan badan 20 persen Britain membutuhkan, yang benar jika Anda melihat hanya pada sepotong kecil dari keuntungan yang tercatat di Inggris Raya "Kami membayar jumlah yang tepat," katanya. Pada kesempatan ini Google menolak memberikan komentar Lebih dari satu dekade lalu, Sebagian besar pendapatan di seluruh dunia mendapatkan credit ke kotak surat Bermuda, dan itu telah ditimbun \$ 58 milyar pada keuntungan ringan dikenakan pajak. Tidak ada keuntungan kemungkinan akan dipindahkan ke otoritas pajak di Perancis dan Italia, di mana perusahaan memiliki kantor, karyawan, dan pelanggan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Drucker, J. (2016, february 19). *Google Isn't Paying the Google Tax*. Retrieved from Bloomberg: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-18/google-isn-t-paying-the-google-tax>

<sup>3</sup> Whitehill, C. C. (2015, april 15). *Google Tax : Diverted Profit Tax is here to stay*. Retrieved from Google Tax diverted profits tax is here to stay \_ Crowe Clark Whitehill.htm

<sup>4</sup> Op,cit, Drucker, j

Tahun 2014 lalu pemerintah Irlandia mengatakan bahwasanya perusahaan multinasional memungkinkan menggunakan *Double Irlandia*, selain itu pemerintah Irlandia juga menawarkan keringanan pajak baru terbaru terhadap keuntungan yang terkait dengan hak paten dari sebuah produk, dimana hal tersebut menjadikan negara Irlandia menjadi surga pajak bagi perusahaan multinasional dimana hal tersebut digunakan dalam menghindari pajak yang besar di negara mereka. Praktek pengalihan pajak yang dilakukan oleh Google tersebut dikenal dengan istilah *Double Irish Arrangement*. *Double Irish Arrangement* adalah praktek finansial yang diketahui dapat memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan dari proses pengalihan pajak ke suatu Negara yang memiliki peraturan pajak yang rendah. Praktek finansial itu diberi nama *Double Irish Arrangement* dikarenakan didalam praktek tersebut Irlandia menjadi satu Negara perantara dalam proses pengalihan pajak tersebut. Selain Irlandia praktek ini juga melibatkan Negara yang acap kali dikenal *sebagai Tax Haven Countries* seperti Guernsey, Bermuda dan Bahama. Sampai saat ini belum ada definisi jelas tentang *Tax Haven Countries*, tapi pada dasarnya *Tax Haven Countries* adalah Negara-negara yang mempunyai sebuah kebijakan pajak yang ringan dimana kesempatan inilah yang digunakan oleh beberapa perusahaan asing untuk mengalihkan uang hasil dari penjualan ke Negara yang ringan pajak daripada di Negara yang besar pajak<sup>5</sup>.

Di dalam kasus ini Google mengalihkan hasil keuntungannya dengan cara mendirikan kantor cabang di Irlandia. Sehingga keuntungan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan Negara dimana kantor cabang Google tersebut berdiri. Ini menjadi penting untuk di ketahui bahwasanya Negara Irlandia memiliki peraturan pajak yang bersahabat, jadi ketika semua pendapatan

---

<sup>5</sup> Wilson, M. (2015, april 29). *Finance and Innovation*. Retrieved from The Worlds 15 Biggest Tax Havens: The world's 15 biggest tax havens.htm

keuntungan Google di simpan di Irlandia maka uang tersebut akan dikenakan hukum pajak Irlandia bukan hukum pajak Britania Raya yang sudah ada<sup>6</sup>.

Pada dasarnya pajak yang diterapkan oleh Negara Britania Raya merupakan terendah dari Negara G7 yaitu sekitar 23% yang mana hal tersebut terus turun hingga tahun 2015 ini sekitar 20%<sup>7</sup>, hal ini membuktikan bahwasanya kebijakan yang dilakukan pemerintahan Britania Raya untuk membuat Negara nya menjadi Negara yang bersahabat dalam menerima investasi asing ke perusahaan besar multinasional yang ada di dalam Negara nya. Dengan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional yang besar salah satunya Google hal ini membuat Negara Britania Raya jadi mewaspadaai setiap tindakan yang bisa merugikan Negara Britania Raya.

Pemerintah Britania Raya pada tahun 2014 menyadari praktek tersebut serta besarnya kerugian finansial yang ia dapat. Pemerintah Britania Raya merasa praktek finansial yang dilakukan oleh Google tersebut adalah praktek tak bermoral karena keuntungan yang didapatkan Google tersebut seharusnya dikenakan pajak Britania Raya karena keuntungan yang didapatkan berasal dari segala kegiatan ekonomi yang dilakukan Google di dalam wilayah yuridiksi Britania Raya<sup>8</sup>. Hal ini lah yang dirasa oleh pemerintah Britania Raya sebagai tindakan yang tidak adil dalam sebuah kegiatan ekonomi, dimana satu perusahaan saja bisa merusak stabilitas ekonomi sebuah Negara jika tidak mengikuti aturan yang baik. Penerapan kebijakan ini efektif di karena kan negara Britania Raya membuat kebijakan yang mengatur tingkah dari perusahaan

---

<sup>6</sup> Wesley, D. (2015, May 27). *Double Irish Deception: How Google-Apple-Facebook Avoid Paying Taxes*. Retrieved May 27, 2015, from Creditloan: <http://visualeconomics.creditloan.com/double-irish-deception-how-Google-apple-facebook-avoid-paying-tax/>

<sup>7</sup> Investment, U. t. (2013). A Guide to UK taxation. *Business is Great*, 1.

<sup>8</sup> Op.cit., Wesley.

multinasional yang melakukan penyelewengan agar tetap bisa membayar pajak sesuai dengan seharusnya, sehingga kedua belah pihak nantinya tidak akan dirugikan dengan adanya tindakan ini nantinya, mengingat seperti yang sudah saya katakan diatas bahwasanya Google.Inc sebagai salah satu objek yang di jadikan acuan dalam pembuatan tersebut berada dalam yuridiksi atau wilayah dari Negara Britania Raya.

Telah terjadi beberapa pertemuan yang dilakukan anantara pemerintah Britania Raya kepada Google, pertemuan tersebut membahas beberapa hal seperti seberapa besar pendapatan Google yang didapat dalam tahun terakhir, pertemua yang dilakukan tersebut terjadi sebanyak 20 kali di tahun 2015, karena masih dalam keadaan klarifikasi dari Google terhadap masalah pajak sehingga pihak Google belum mau membayar pajak yang ditetapkan, karna usaha dan peran pemerintah yang sabar tapi pasti ditambah dengan data serta penyelidikan selama 6 tahun dengan bukti yang sangat signifikan.<sup>9</sup>

Dalam skripsi ini mencoba menjelaskan bahwasanya tindakan yang di lakukan oleh Britania Raya dalam melaksanakan kebijakan dalam negeri yang di sebut “*Diverted Profit Policy*” merupakan objek yang sangat menarik untuk di teliti. Kebijakan tersebut mengandung semangat dari *International Political Economics*, sebagai langkah Google dalam mengalihkan keuntungan untuk menghindari pajak adalah bentuk perilaku ekonomi internasional karena terlibat negara lain sebagai aktor utamanya. Aksi tersebut juga merupakan bagian dari Globalisasi Ekonomi. Ini sangat menarik, melihat Britania Raya merupakan negara yang memiliki kepercayaan nilai demokasi liberal, secara sekilas Negara yang menganut kepercayaan ini akan membiarkan pasar serta keuangan yang diperoleh berjalan sesuai dengan system pasar itu sendiri, tanpa Negara ikut

---

<sup>9</sup> Op,cit Wesley

campur didalamnya, tetapi dalam hal ini malah Britania Raya ikut campur dalam system tersebut. Skripsi ini akan berusaha mencari alasan kenapa Britania Raya mengimplementasikan kebijakan tersebut mengingat mereka adalah negara dengan menganut nilai liberal ekonomi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan di ulas dalam skripsi ini adalah “Mengapa Penerapan Kebijakan *Diverted Profit Tax* kepada Google.Inc oleh Britania Raya Efektif?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Politik Ekonomi Internasional**

Politik ekonomi internasional adalah salah satu sub-ilmu dari perpaduan ilmu hubungan internasional dan ilmu politik. Cabang ilmu ini pada dasarnya memfokuskan diri untuk menciptakan analisis yang berbasas pada interaksi antara domestik dan internasional faktor dari ekonomi. Karena kedua hal tersebut pada hakikatnya memiliki andil dalam mempengaruhi perumusan kebijakan ekonomi dan juga hasil daripada kebijakan tersebut. politik ekonomi internasional juga menitik beratkan analisisnya pada *national interest* yang

berhubungan dengan ekonomi suatu negara, dan bagaimana *national interest* tersebut dapat menjadi sorotan utama politik pemerintahan dan menentukan pola perilaku suatu negara<sup>10</sup>.

Pada dasarnya analisis yang akan dipaparkan dalam skripsi ini mengandung nilai-nilai analisis politik ekonomi internasional. Hal itu dikarenakan, skripsi ini akan membuktikan hipotesa dengan sasaran utama bahwasannya kebijakan pajak Britania Raya mengenai pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh Google adalah bentuk hasil daripada interaksi ekonomi antara aktor domestik (Britania Raya dan Google) dengan aktor internasional (Irlandia dan Bahama sebagai negara dimana Google mendirikan perusahaan yang berperan penting dalam pengalihan keuntungan agar menghindari pajak dari Britania Raya). Skripsi ini juga percaya bahwasannya perumusan dan pengimplementasian peraturan baru Britania Raya terhadap pajak pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan kepentingan ekonomi Britania Raya

## **2. Globalisasi Transformasionalism**

Pokok inti pandangan dari transformasionalis ini ialah lebih menitik beratkan pada adanya keyakinan bahwa pada permulaan millennium baru, Globalisasi adalah kekuatan utama di balik perubahan social, ekonomi, politik yang tengah menentukan masyarakat modern dan tatanan dunia yang nantinya tidak adanya perbedaan antara international dan domestik yang akan terlihat<sup>11</sup>. Dalam hal ini globalisasi membuat dan memaksa Negara yang ada untuk bisa

---

<sup>10</sup> Frieden, J., & Martin, L. L. (n.d.). *International Political Economy: Global and Domestic Interaction*. In *The State in An Era of Globalization*.

<sup>11</sup> Held, D., Macgrew, A., Goldbalt, D., & Peraton, J. (n.d.). Global Transformation-Introduction. *Global Transformation*.

menghadapi tantangan yang ada, Google dalam hal ini telah menggunakan landasan globalisasi dalam melancarkan strateginya dalam menghindari pajak yang tinggi dari Inggris.

Secara tidak langsung bahwasanya dalam tatanan dunia yang modern saat ini memaksa Negara harus bekerja keras guna mempertahankan aspek ekonominya guna mengurangi kerugian yang sangat besar seperti yang dilakukan oleh Google.

### **3. Konsep Multinational Corporations Versus The nation-state**

Ini merupakan salah satu ide dari Cohen yang mengatakan bahwasanya pada saat ini perusahaan Multinational Corporations memiliki kekuatan untuk membentuk internasional politik dan tatanan ekonomi, Cohen juga mengatakan bahwasanya perusahaan Multinational Corporation menggerus kedaulatan sebuah negara, pemerintah juga tidak lagi menjadi aktor yang kuat dalam ekonomi regional di dalam teritori Negara tersebut dengan bukti bahwasanya perusahaan Multinational Corporation sukses membayar pajak sesuai dengan strategi dari perusahaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tindakan penyelewengan pajak yang dilakukan Google di Britania Raya. Selain itu Cohen juga mengatakan dimana pasar telah terbukti melampaui batas-batas nasional. Sebagai Multinational Corporation yang besar tentunya mereka akan memperbesar operasi internasionalnya, yang mana hal ini membuat kesenjangan menjadi melebar antara perusahaan dan yuridiksi Negara<sup>12</sup>.

Di era yang semakin maju membuat teknologi menjadi salah satu cara untuk menghapus batas antar Negara yang ada dan geografis yang kekal, karena pasar dapat dengan mudah berpindah

---

<sup>12</sup>Ibid, 237

dalam memasarkan hasil produksinya, hal ini juga membuat Negara kurang memiliki kemampuan untuk menyediakan basis yang efektif dan efisien di pemerintahannya.

#### 4. Konsep *The International Regulation of Multinational Corporations*

Cohen memaparkan dalam sebuah model yang menunjukkan beberapa opsi yang dimiliki oleh suatu negara di dalam suatu regime FDI. Didalam model tersebut ada 4 aktor utama, (1) Negara penerima (*Host Countries*), (2) Negara asal investasi, (3) Perusahaan Multinasional, (4) *Stakeholder* ( Publik pada umumnya, para pekerja, lingkungan dan kelompok kepentingan publik yang terorganisasi). Model itu diilustrasikan sebagai berikut(Ibid):

Table 1.1. Government Trade-off

Sumber : Cohen, D. S. (2007). *Multinational Corporations Versus The Nation-State*. In C. D.Stephen, *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment* (pp. 233-234). New York: Oxford University Press, Inc.

	<b>Regime Yang Berasaskan Efisiensi</b>	<b>Regime yang Berasaskan Keadilan</b>
<b>Kewajiban (Peraturan) dan Batasan</b>	Maksimum untuk pemerintah negara penerima; Minimum untuk perusahaan multinasional	Maksimum untuk Perusahaan Multinasional; Minimum untuk pemerintah negara penerima
<b>Hak dan Kebebasan dalam Bertindak</b>	Maksimum untuk Perusahaan Multinasional; Minimum untuk Pemerintah negara penerima	Maksimum untuk Pemerintah Negara Penerima; Minimum Untuk Perusahaan Multinasional

Model diatas pada dasarnya menunjukkan bahwasana aktor pertama dan keempat merasa bahwasannya adalah suatu hal yang esensial untuk negara penerima infestasi untuk memiliki otoritas untuk meminta perusahaan yang memiliki cabang di negaranya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan domestik, nilai dan definisi suatu perusaan yang baik dari negara penerima. Tujuannya adalah agar negara penerima infestasi dapat memastikan bahwasannya perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal ini dikategorikan sebagai kelompok kewajiban dan batasan yang brasaskan efisiensi. Sedangkan aktor nomor dua dan tiga beranggapan bahwasannya negara seharusnya tidak melimitasi dan membuat peraturan yang dapat menghalangi kebebasan suatu perusahaan untuk mendapatkan kesuksesan finansial. Karena kedua aktor tersebut memiliki paham keadilan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang berasaskan pada skema ideology pasar bebas. Hal inilah yang dikategorikan sebagai Hak dan Kebebasan yang berasaskan keadilan<sup>13</sup>. Adil dalam hal ini adalah adil yang sesuai dengan ideologi pasar bebas.

Skema yang telah dipaparkan diatas sangat sesuai dengan posisi yang dimiliki oleh Britania raya Sebagai negara penerima dan Google sebagai perusahaan multinasional yang berinfestasi. Didalam sengketa tersebut Britania Raya berjuang untuk mengendalikan aktifitas Google untuk kembali sesuai dengan peraturan lokal britania raya dan nilai yang mereka junjung, karena belum ada regime internasional yang menadvokasi kerugian suatu negara atas tidakan finansial internasional suatu perusahaan multinasional. Sedangkan Google berpegang teguh bahwasannya yang mereka lakukan adalah sesuai dan tidak melanggar hukum internasional yang berhubungan dengan aktifitas finansialnya. Karena yang mereka lakukan adalah bentuk hak dan kebebasan mereka sebagai perusahaan dalam skema pasar bebas.

---

<sup>13</sup> Ibid, 256

Di dalam penelitian ini, model yang telah dipaparkan sebelumnya akan menunjukkan posisi Britania Raya dan Google sebelum terdeteksinya penyimpangan yang dilakukan oleh Google dan sesudah terkuaknya penyimpangan tersebut. Di dalam pergeseran posisi tersebut akan nampak mengapa pada akhirnya kebijakan yang dilakukan oleh Britania Raya akan efektif dalam mengembalikam hak Britania Raya yang direnggut oleh penyelewengan pajak Google.

## **5. Konsep *Strong State***

Negara yang kuat menggunakan kekuatannya untuk mengatur dari paksaan yang di lakukan oleh konstitusi yang ahli. Mereka mengontrol wilayah mereka and mengatur monopoly dengan menggunakan paksaan yang masih dalam wilayah teritori sebuah negara mereka.<sup>14</sup> Negara yang kuat memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyediakan fungsi utama pemerintah dalam legitmasi mereka masing masing. Sebuah bangsa dan negara harus aktif dalam menjalankan pusat pemerintahan, politik dan ekonomi secara terpusat dan tertuju untuk rakyat, hal ini di lakukan untuk menanggapi apa yang menjadi permintaan rakyat terhadap pemerintah tersebut, perubahan sistem politik yang terjadi di pemerintahan emang harus terjadi mengingat sistem yang lama sudah tidak cocok untuk menanggapi tuntutan dari masyarakatan yang modern oleh karena itu, perubahan dalam sistem tersbut sangat lah penting.<sup>15</sup> Negara yang kuat pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang bebas dan terbuka di mana setiap warga negara nya bisa bepartisipasi dalam setiap aspek politik di pemerintah dan berhasil di semua bidang yang ada. Negara yang kuat juga memiliki sistem yang bisa mengatur masyarakat yang ada di dalam negara atau territorial negara tersebut, dapat menjaga kedaulatan mereka baik dari dalam ataupun dari luar negara tersebut.

---

<sup>14</sup> Hanion, Q. (2011). Adapting America's Security Paradigm and Security Agenda. *Strong State*, 5.

<sup>15</sup> ROTBERG, R. I. (n.d.). Failed States, Collapsed States, Weak States : Cause and Indicators. *strenght and weaknes*, 4.

Memiliki hukum yang kuat dalam mengatur setiap tindakan masyarakat yang ada dalam wilayah hukum mereka.

#### **D. Hipotesis**

Skripsi ini menarik dua hipotesis awal di dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama kebijakan Diverted Profit Tax yang diterapkan oleh Britania Raya efektif dikarenakan didalam ketiadaan regime internasional yang mengatur aktifitas perusahaan multinasional di dalam suatu negara, hukum domestik merupakan sarana tepat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi suatu negara. Kedua, kebijakan tersebut efektif dikarenakan dapat mengatur kegiatan ekonomi perusahaan multinasional agar selaras dengan kepentingan negara.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan sumber penelitian yang sudah ada di perpustakaan (library research) dan di tambah dengan materi yang sudah di cetak sebagai buku, koran, jurnal dan laporan. Dan tidak menutup kemungkinan penggunaan media elektronik seperti berita di televisi dan berita-berita online yang di terima dari internet. Oleh karena itu semua data yang dikumpulkan untuk analisis ini adalah data sekunder. Data tersebut akan di analisis menggunakan teori yang sudah di jelaskan sebelumnya. Meskipun data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data sekunder, data berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan penelitian saya sebagaimana telah saya seleksi ketika saya

melakukan kajian pustaka (library research) karena skripsi ini adalah penelitian yang dapat dipercaya.

#### **F. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian yang akan di paparkan oleh skripsi ini adalah implementasi *Diverted Profit Tax Policy* oleh United Kingdom yang dirancang pada tahun 2014 hingga pengimplementasiannya di tahun 2015.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I: Di dalam bab I, skripsi ini akan memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan pengantar daripada penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Di dalam bab II, skripsi ini akan memaparkan penjelasan awal mengenai peraturan pajak Inggris sebelum di implementasikan peraturan baru Inggris, *Diverted Tax Policy*.

Bab III: Pada Bab III ini, skripsi ini akan menjelaskan tentang praktek pengalihan keuntungan yang dilakukukan oleh Google, dan perumusan *Diverted Tax Policy* sebagai respon terhadap hal tersebut.

Bab IV: Bab ini akan membuktikan hipotesa dengan melakukan analisis terhadap kebijakan *Diverted Profit Tax* yang diterapkan oleh Britania Raya efektif dikarenakan didalam ketiadaan regime internasional yang mengatur aktifitas perusahaan multinasional di dalam suatu Negara, hukum domestik merupakan sarana tepat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi suatu Negara. Kedua, kebijakan tersebut efektif dikarenakan dapat mengatur kegiatan ekonomi perusahaan multinasional agar selaras dengan kepentingan Negara.

Bab V: Bab ini akan menjadi Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh paparan analisis yang di jelaskan oleh skripsi ini.